

PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMPN I MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

Oleh
*Iin Sumidar

Abstrak: Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan pengelolaan manajemen sekolah dalam rangka memberikan wewenang yang lebih luas kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah: Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam bidang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam bidang personalia dan pada pengelolaan keuangan pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, komite sekolah, pengawas dan bendahara sekolah. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di mulai dari penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembagian tugas, silabus, RPP, dan kalender pendidikan, (2) bidang personalia Kepala sekolah SMPN 1 Meulaboh melaksanakan pembinaan dan peningkatan profesional guru melalui kegiatan pelatihan, MGMP, Memberikan izin untuk pendidikan lanjutan dan melakukan supervisi, sedangkan rekrutmen, mutasi dan pensiunan masih di atur oleh Pemerintah Daerah (3) dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan penetapan sumber dana, analisis kebutuhan, alokasi anggaran, pengawasan, dan pelaporan dengan melibatkan stake holder dan komite sekolah.

Kata kunci: *Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Manajemen pendidikan pada hakekatnya sebagai penataan, pengaturan dan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat mencapai tujuan keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien sehingga melahirkan suatu kebijakan dalam menentukan penerapan program pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Manajemen berbasis sekolah yang juga merupakan suatu proses pendidikan yang terlibat di berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif dan berkualitas.

Perubahan manajemen berbasis sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa:

- 1) Merupakan lembaga yang mandiri dan dinamis,
- 2) Dinamika berlangsung secara alamiah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah,
- 3) Proaktif dalam

upaya mengembangkan pelayanan pendidikan, 4) Inovatif dan kreatif terhadap upaya pengembangan mutu pendidikan, 5) Meningkatkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan 6) Memanfaatkan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi saat ini termasuk persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah.

Sudarsono (2007: 45). mengemukakan bahwa “Untuk memenuhi kebutuhan ini Pemerintah merasa perlu untuk menerapkan dan mengembangkan model manajemen yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah”. Berdasarkan pernyataan di atas penulis

menyatakan bahwa: manajemen Berbasis Sekolah dapat dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah (manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dan sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Penerapan Manajemen berbasis sekolah diharapkan dapat memberikan suatu pembaharuan dalam menata, mengatur, menyusun dan melaksanakan setiap komponen sumberdaya manusia dalam lingkungan SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang hendak dicari adalah data yang akan memberikan gambaran dan melukiskan realita sosial yang kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang lebih konkrit.

Menurut Moleong (2006:3) "Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsikan/uraian berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang terlibat dalam penelitian yang dapat diamati dalam suatu situasi sosial". Selanjutnya peneliti berusaha memahami makna perilaku personil yang terlibat dalam penelitian ini yang terkait dengan penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, komite sekolah, pengawas dan bendahara sekolah di SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Pengumpulan data dalam penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik, lebih menitik beratkan pada perekaman situasi yang terjadi dalam konteks masalah yang dibahas. Metode deskriptif analitik memungkinkan adanya suatu langkah

evaluatif atas keadaan yang nyata terjadi. Metode deskriptif analitik ini memungkinkan peneliti memberikan masukan-masukan yang dipandang berguna, bermanfaat, dari aspek yang dikaji atau terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga akan memberikan suatu analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi yang terjadi.

Analisis pada saat pengumpulan data, yaitu selama pengumpulan data peneliti merekam dan membuat catatan lapangan, melakukan *memberchek* dengan subjek penelitian yang bersangkutan, mengadakan audit trail (uji kecocokkan data), melakukan triangulasi untuk mendapatkan keabsahan data.

Analisis setelah data terkumpul, yaitu mereduksi data dengan mencatat, menggolongkan, dan mengklarifikasi hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian serta menghubungkan data antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga data diperoleh secara jelas menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.

KAJIAN PUSTAKA

Upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilaksanakan dengan menata manajemen desentralisasi sebagai konsep organisasi yang mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Desentralisasi tidak dimaksudkan untuk memperbesar ketimpangan antara daerah dengan pusat atau antara daerah yang ada di Indonesia, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dengan tidak mengabaikan kebhinekaan.

Engkoswara (2010:292), menyatakan bahwa: "Desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada daerah sehingga wewenang dan tanggungjawab daerah, termasuk didalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya". Sedangkan desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan.

Usman, Nasir. (2007:54), mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan adalah:

Salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak, baik secara regional maupun secara internasional.

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan. Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah terbelenggu oleh kekuasaan birokrasi mulai dari kekuasaan tingkat pusat hingga daerah. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang “dikendalikan”. Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan namun, mereka dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.

Murniati dan Usman (2009:37) mengemukakan bahwa : “Manajemen merupakan kegiatan mengatur berbagai sumber daya, baik manusia maupun material dalam rangka melakukan berbagai kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal”. Dalam mengoptimalkan sumber-sumber daya yang berkenaan pemberdayaan sekolah merupakan alternative yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Penerapan hal itu memerlukan suatu perubahan kebijakan dibidang manajemen pendidikan dengan prinsip memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masing-masing sekolah secara local.

Dengan mengalihkan wewenang dalam keputusan dari pemerintahan tingkat pusat/Dinas Pendidikan Provinsi ke tingkat sekolah, diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan lebih mampu menentukan arah

pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Pada pelaksanaannya disadari bahwa pemberian kewenangan kepada sekolah melalui pendekatan MBS memerlukan proses dan waktu. Salah satu aspek yang memerlukan proses dan waktu untuk diubah adalah desain organisasi yang mampu mengakomodasi dan mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan demikian, sekolah secara kreatif dan bertanggung jawab dapat melakukan kegiatan untuk mengelola program-programnya secara efektif dan efisien. Chapman (Fattah, 2008:15) mengemukakan bahwa :

MBS sebagai terjemahan dari *school based management* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen kesetiap pihak yang berkepentingan di tingkat local (*Local Stakeholders*).

Berdasarkan kutipan di atas MBS memberikan merupakan salah satu upaya pengembangan gagasan menyambut kebijakan pemerinth dalam rangka desentralisasi yang menempatkan sekolah sebagai suatu institusi pendidikan yang mandiri. Pemahaman tentang MBS diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada para pengelola pendidikan dalam pembudayaan dan peningkatan mutu serta pengendalian sekolah.

Otonomi dalam pengembangan kurikulum memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Menurut Rusman (2009:17), secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan fungsi-fungsi manajemen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah:

- (a) mengelola perencanaan kurikulum;
- (b) mengelola implementasi kurikulum;
- (c) mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum;
- (d) mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan

kenaikan kelas/kelulusan; (e) mengelola pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar; dan (f) mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler”.

Dalam MBS, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya harus disentralisasikan ke sekolah, agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas, hanya menetapkan standar nasional, yang pengembangannya diserahkan kepada sekolah. Dengan demikian, disentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan MBS.

Berkaitan dengan manajemen personalia dalam suatu organisasi, perlu adanya suatu pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan personalia dalam konteks pengembangan sumber daya manusia agar dapat memajukan organisasi sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Menurut Harun (2009:47) “Pengembangan sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dari potensi yang ada pada diri seseorang dikembangkan lagi untuk dapat mengimbangi kedudukan dan perkembangan zaman”. Sehingga dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum dan waktu pelaksanaannya agar tujuan dari kegiatan pengembangan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mulyasa (2009:13) “Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mengkaji ulang masaah pendidikan. Hal ini karena pendidikan mempunyai kontribusi dalam memajukan masyarakat dan sebagai wahana menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana pembangunan anak bangsa”. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ini lebih diperlukan lagi dalam konteks otonomi dan desentralisasi pendidikan.

Menurut Fatah (2007:23), “Pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan”. Kegiatan yang ada dalam administrasi pembiayaan meliputi tiga hal yaitu penyusunan anggaran yang dapat disebut

dengan perencanaan pembiayaan pendidikan, pembukuan yang termasuk dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subansy yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum dan UN).

HASIL PEMBAHASAN

1. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang KTSP

Pelaksanaan Manajemen berbasis Sekolah pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembagian tugas, penyusunan silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP) serta dan kalender pendidikan pada masing-masing Tingkat Satuan Pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bertujuan agar setiap satuan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional dengan menyesuaikannya pada kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kunandar (2010:154) menjelaskan bahwa : “Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan

sekolah, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan atau pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan memulai keberhasilan mengajar. Oleh sebab itu pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kemampuan peserta didik pada sekolah tersebut.

2. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Personalia

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang menyangkut efektivitas penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat diperoleh beberapa temuan dan temuan tersebut di analisis faktor penyebab dan akibat dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks pengelolaan personalia sekolah, Rekrutmen, mutasi dan pensiunan guru di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, sekolah hanya mengisi data rencana pemenuhan kebutuhan guru dan di serah kepada dinas pendidikan melalui laporan bulanan. Kemudian rekrutmen dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tes dan pemutihan. Kepala sekolah SMPN 1 Meulaboh hanya melakukan Pembinaan dan peningkatan profesional guru pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penataran, MGMP, memberikan izin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan melakukan supervisi.

Mulyasa (2009:15), menyatakan bahwa: “1) perencanaan pegawai, 2) pengadaan pegawai, 3) pembinaan dan pengembangan pegawai, 4) promosi dan mutasi, 5) pemberhentian pegawai, 6) kompensasi, dan 7) penilaian pegawai”. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang di harapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang di perlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

3. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Keuangan

Penyusunan analisis keuangan pada SMPN 1 Meulaboh lebih menekankan pada kebutuhan sekolah sesuai standar pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Penyusunan RKAS pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dimulai dengan menganalisis kebutuhan dan sumber keuangan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil analisis keuangan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang melibatkan *stakeholders* termasuk komite sekolah. Hal ini sesuai dengan Fattah dan Ali (2008:43) yang mengemukakan bahwa :

“Desentralisasi pendidikan dalam implementasinya memberikan kemungkinan dan peluang besar kepada sekolah secara mandiri dengan kesenangan desentralisasinya, untuk mengelola dana dan biaya pendidikan untuk kepentingan pendidikan yang dianggap yang paling penting di sekolah tersebut. Dengan pemahaman manajemen berbasis sekolah maka setiap sekolah pada awal tahun anggaran sudah memiliki rencana penggunaan biaya yang berorientasi kepada upaya peningkatan mutu pendidikan”.

Berdasarkan kutipan di atas keuangan sekolah selalu di susun sesuai dengan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). Manajemen keuangan sekolah dapat menentukan peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Penerapan Manajemen berbasis Sekolah dalam bidang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembagian tugas, silabus, RPP serta kalender penentuan kalender pendidikan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan MBS pada bidang kurikulum tingkat satuan pendidikan di laksanakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan pendidikan dan proses pembelajaran. Guru harus menguasai kompetensi atau kemampuan untuk membuat desain instruksional sesuai dengan kaedah-kaedah pedagogik yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Langkah-langkah yang harus dilalui oleh guru dalam pengembangan bahan pembelajaran adalah mengidentifikasi bahan pelajaran yang akan disajikan setiap pertemuan, menyusun kerangka materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional dan pencapaiannya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
- B. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang personalia pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan dan pembinaan kemampuan profesional guru melalui pelatihan, pendidikan lanjutan guru-guru juga dikembangkan mutunya dengan memberikan izin dan kemudahan mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi, MGMP dan melakukan supervisi. Personil sekolah atau sumber daya tenaga kependidikan guru dalam peningkatan profesional kepala SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam bidang proses belajar mengajar, khususnya pengembangan mutu guru yaitu (1) memberi kemudahan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kualifikasi guru. (2) memberi intensif guru mengajar lebih dari 18 (delapan belas) jam/Minggu diberi intensif. (3) Memberi dispensasi oleh guru yang mengikuti penataran, seminar, dan jenis pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, (4) memberikan kemudahan bagi guru yang akan naik pangkat sepanjang telah memenuhi persyaratan angka kredit dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (5) Memberikan kemudahan bagi guru yang akan memperoleh kenaikan gaji berkala. Pengelolaan rekrutmen, mutasi dan pensiunan guru masih di atur oleh pemerintah kabupaten Aceh barat.
- C. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan keuangan pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat lebih menekankan pada analisis kebutuhan dan sumber keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil analisis keuangan yang melibatkan *stakeholders* termasuk komite sekolah. Pengeluaran dana yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan secara efektif dan efisien, artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada daftar unjuk proyek yang telah di tetapkan oleh perencanaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan Manajemen keuangan pada SMPN 1 Meulaboh di laksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban secara efektif dan efisien sehingga tidak di temukan penyalahgunaan anggaran. Penggunaan dana yang telah disusun di dalam RKAS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan petunjuk juknis termasuk pelaksana dan evaluasi keuangan sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta implikasi yang akan muncul dari kesimpulan dapat disusun saran sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan keterlibatan guru dalam merumuskan kebijakan dan program sekolah sehingga efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah untuk

- peningkatan mutu sekolah benar-benar dapat dilaksanakan oleh guru dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Pengembangan kemampuan profesional guru sangat penting dalam pengelolaan proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Komitmen dan kerja keras antara guru dan kepala sekolah merupakan faktor utama untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada sekolah masing-masing dengan cara : (a) membuat perencanaan, (b) melaksanakan program, (c) bekerja dengan kelompok, (d) berkoordinasi dengan GMP, guru senior atau guru pembimbing, (e) melakukan evaluasi, (f) melakukan renovasi hasil pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang optimal.
 - c. Komite Sekolah yaitu masyarakat, seharusnya secara aktif bahkan positif memberikan bantuan ke sekolah agar setiap sekolah dapat memenuhi kebutuhannya untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif.
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dapat menjadi suatu pola pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam membangun sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

DAFTAR PUSATAKA

- Engkoswara dan Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang dan Ali Muhammad. (2008). *MBS*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kunandar. (2010). *Guru profesional: Implementasi Kurikulum satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa. E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murniati dan Usman, Nasir. (2009). *Implementasi Manajemen Stratejik*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Pendidikan kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Usman, Nasir. (2007). *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Bandung: Mutiara Ilmu.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Tesis Universitas Jakarta.